BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH
JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak: (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com
Website: https://badanpengarahpapua.go.id/

Nomor : 47/IX/2026/BP3OKP.PT
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Agustus 2026

KepadaYth,
Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua
Di-
Jayapura

Surat Pengantar

1. Berdasar:
   a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Papua
   b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 Tentang OTK BPP Sesuai Pasal 2 Dan 3 Tugas Dan Fungsi BP3OKP.
2. Berikut Ini Kami Menyampaikan Laporan Kegiatan Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Tengah Bulan Agustus 2026.

Demikian Kami Sampaikan Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan banyak terimakasih.

Nabire, 7 September 2026

Anggota BP3OKP Papua Tengah

IRJEN POL (P) DRS.PIETRUS WAINE, S.H., M.HUM

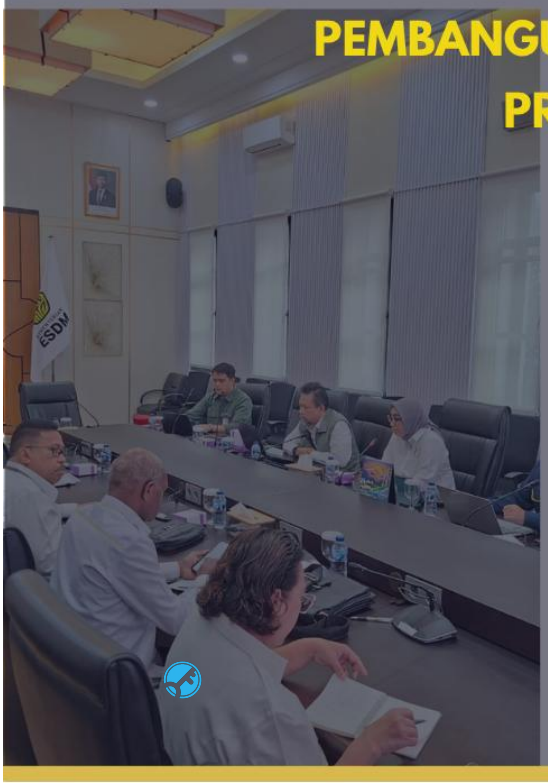
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BPP

LAPORAN ANGGOTA BPP PERWAKILAN PAPUA TENGAH

BULAN AGUSTUS 2026

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH







BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN BULANAN ANGGOTA BPP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA TENGAH

1. RAPAT KOORDINASI ANGGOTA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP/BPP) PROVINSI PAPUA TENGAH BERSAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BAPPENAS RI) 01 AGUSTUS 2026.

A. Latar belakang dan Tujuan



Dalam rangka memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Tengah, telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) di Jakarta. Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Tengah berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional, amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta kebutuhan dan karakteristik masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Provinsi Papua Tengah memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata, keterbatasan konektivitas, pengembangan ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kendala, serta kondisi sosial dan keamanan di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara BPP/BP3OKP, Bappenas, kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pemerintah kabupaten agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. **Rapat koordinasi ini bertujuan** untuk memperkuat sinergi antara BP3OKP/BPP dengan Bappenas RI dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Tengah agar sesuai dengan kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, dan amanat Otonomi Khusus Papua, serta memastikan program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK ini dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Agustus 2026 pada pukul 11.0012.00 WIT. Rapat ini bertempat di kantor Bappenas RI di Jakarta.

C. Peserta

Agenda Pertemuan ini dihadiri enam (6) Anggota BPP Se-Tanah Papua dan tim dari Bappenas.

D. Hasil yang di capai

Berdasarkan pembahasan bersama, rapat menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut:



1. Bappenas RI dan BPP/BP3OKP akan memperkuat koordinasi dalam perencanaan dan pengawalan pembangunan Papua Tengah
2. Program pembangunan Papua Tengah perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan kekhususan dan karakteristik Papua.
3. Pembangunan OAP menjadi salah satu orientasi utama, terutama melalui. peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
4. Wilayah 3T perlu mendapatkan prioritas pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
5. Program pendidikan Papua Cerdas perlu diperkuat melalui peningkatan akses, kualitas pendidikan, beasiswa, sarana prasarana, dan pengembangan kompetensi generasi muda.
6. Program Papua Sehat perlu diperkuat, terutama dalam menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
7. Program Papua Produktif perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, kewirausahaan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sektor ekonomi potensial lainnya.
8. Pembangunan infrastruktur dasar perlu dipercepat, terutama jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan.
9. Monitoring dan evaluasi Dana Otsus perlu terus diperkuat agar penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
10. Data pembangunan perlu diperkuat dan diperbarui secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan.
11. Koordinasi lintas kementerian/lembaga perlu ditingkatkan agar pembangunan Papua Tengah tidak berjalan secara parsial.
12. BPP/BP3OKP akan terus melakukan pemantauan lapangan terhadap berbagai program prioritas pembangunan.

2. KOORDINASI ENAM ANGGOTA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BPP/BP3OKP) BERSAMA DEPUTI III SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN DI JAKARTA 01/08/2026.

A. Latarbelakang dan Tujuan



Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sekaligus memperkuat pelayanan dasar, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Dalam rangka memastikan kebijakan



Otonomi Khusus berjalan secara efektif, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP/BP3OKP). BPP/BP3OKP memiliki posisi strategis dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan harmonisasi pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, pertemuan bersama Deputi III Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta menjadi momentum penting untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan pembangunan, berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Rapat ini juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara BPP/BP3OKP dengan Sekretariat Wakil Presiden dalam memastikan program dan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Papua. Khususnya di Provinsi Papua Tengah, berbagai tantangan pembangunan masih memerlukan perhatian bersama, antara lain keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar yang belum merata, kondisi wilayah 3T, keterbatasan jaringan listrik dan telekomunikasi, pengembangan ekonomi masyarakat, serta perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus. Atas dasar tersebut, dilaksanakan rapat koordinasi antara enam anggota BPP/BP3OKP dengan Deputi III Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tengah, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang ditemukan di lapangan, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara BPP/BP3OKP dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memperoleh arahan dan merumuskan langkah tindak lanjut dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK ini dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2026 pada pukul 11.00 s/d 12.00 WIT. Rapat ini bertempat di kantor Setwapres RI di Jakarta.

C. Peserta

Agenda Pertemuan ini dihadiri enam (6) Anggota BPP Se-Tanah Papua dan tim dari Setwapres.

D. Hasil kesepakatan Rapat

Berdasarkan pembahasan antara enam anggota BPP/BP3OKP dengan Deputi III Sekretariat Wakil Presiden, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi BPP/BP3OKP dan Deputi III Sekretariat Wakil Presiden sepakat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua.
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring BPP/BP3OKP di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

3. Percepatan Pendidikan Pembangunan pendidikan OAP harus menjadi salah satu prioritas utama, khususnya di wilayah 3T.
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan perlu diperluas dan diperkuat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses. Pemberdayaan Ekonomi Program ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi OAP.
5. Percepatan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur dasar harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis setiap wilayah.
6. Penguatan Data Setiap program pembangunan harus didukung data yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tindak Lanjut Lintas Kementerian/Lembaga Permasalahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.
8. Penyusunan Rekomendasi BPP/BP3OKP akan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan kebijakan pemerintah.

3. RAPAT SHEK BADAN PENGARAH PAPUA (BPP) BERSAMA KEMENTRIAN ESDM DI JAKARTA - 02 AGUSTUS 2026.

A. Latar Belakang dan Tujuan



Pembangunan di Tanah Papua merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di berbagai bidang, termasuk bidang energi dan sumber daya mineral. Ketersediaan energi listrik yang memadai, merata, berkelanjutan, dan terjangkau merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi dasar bagi peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, transportasi, serta pengembangan usaha masyarakat. Kondisi geografis Papua yang luas, berbukit, bergunung, serta memiliki sejumlah wilayah yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur energi. Sejumlah wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), masih menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik dan energi yang dapat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain aspek ketenagalistrikan, Papua memiliki potensi sumber daya mineral dan energi yang besar. Pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Papua, keberlanjutan lingkungan, peningkatan nilai tambah, serta kontribusi terhadap kesejahteraan Orang Asli Papua.

Dalam konteks tersebut, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Tanah Papua. Koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat diperlukan agar berbagai program pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.



B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK ini dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2026 pada pukul 11.00 s/d 12.00 WIT. Rapat ini bertempat di kantor Menteri ESDM RI di Jakarta

C. Peserta

Agenda Pertemuan ini dihadiri enam (6) Anggota BPP Se-Tanah Papua dan tim dari Menteri ESDM.

D. Hasil Capaian Rapat

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat diperoleh:

1. Kesamaan persepsi antara BPP dan Kementerian ESDM mengenai prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Papua.
2. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan ketenagalistrikan di wilayah Papua, khususnya wilayah 3T.
3. Dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau.
4. Penguatan sinergi antara Kementerian ESDM, BPP, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program pembangunan energi.
5. Rumusan rekomendasi terkait pengembangan energi baru dan terbarukan yang sesuai dengan kondisi geografis Papua.
6. Penguatan keterlibatan masyarakat dan Orang Asli Papua dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya energi dan mineral.
7. Tersusunnya langkah tindak lanjut yang dapat menjadi bahan koordinasi BPP dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
8. Terwujudnya pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih merata, berkelanjutan, inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.

4. RAPAT KOORDINASI BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP/BPP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA TENGAH BERSAMA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK RI) DI JAKARTA 3/08/2026

A. Latar belakang dan Tujuan



Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonom baru di Tanah Papua memiliki tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan dasar yang belum merata, kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberian Otonomi Khusus kepada Papua pada prinsipnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur, perlindungan hak hak dasar masyarakat Papua serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun demikian, besarnya dukungan anggaran melalui kebijakan Otsus harus disertai dengan tata kelola yang baik. Perencanaan dan penganggaran perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan program juga perlu disertai pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang efektif. KPK dalam kajiannya mengenai pengelolaan Dana Otsus sebelumnya mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain perencanaan dan penganggaran yang belum konsisten, belum terintegrasinya sistem data, lambatnya penyaluran dan pelaporan, serta perlunya penguatan pengawasan dan sistem pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi Papua Tengah agar pelaksanaan Otsus tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan, Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara BPP Papua Tengah dan KPK RI sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, memperbaiki perencanaan pembangunan dan memastikan program Otsus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Rapat koordinasi di Jakarta pada bulan Agustus 2026 menjadi salah satu langkah untuk membangun sinergi antara fungsi pengarah dan koordinasi BPP dengan fungsi pencegahan, koordinasi dan supervisi KPK dalam rangka memperkuat tata kelola pembangunan di Provinsi Papua Tengah. **Koordinasi ini bertujuan** untuk memperkuat sinergi antara BPP Papua Tengah dan KPK RI dalam meningkatkan tata kelola serta akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, memperkuat pencegahan korupsi, dan memastikan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK ini dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Agustus 2026 pada pukul 11.00 s/d 12.00 WIT. Rapat ini bertempat di kantor KPK RI di Jakarta

C. Peserta

Agenda Pertemuan ini dihadiri enam (6) enam Anggota BPP Se-Tanah Papua dan tim dari KPK RI.

D. Hasil Yang Dicapai



Berdasarkan pembahasan dalam rapat koordinasi, beberapa hasil dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- Penguatan koordinasi antara BPP Papua Tengah dan KPK RI dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar program yang menggunakan Dana Otsus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, data yang valid dan prioritas pembangunan daerah.
- Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Otsus, terutama program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan transparansi penggunaan Dana Otsus, termasuk penguatan mekanisme pelaporan sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
- Penguatan sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan penerapan prinsip integritas dalam seluruh tahapan pembangunan.
- Penguatan pengawasan pengadaan barang dan jasa, khususnya terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur dan program strategis yang menggunakan anggaran Otsus.
- Peningkatan kualitas pelaporan, sehingga laporan pelaksanaan Otsus tidak hanya berisi aspek administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga menunjukkan capaian program, hasil dan dampak bagi masyarakat.
- Peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama antara BPP, KPK, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola pembangunan.
- Menyusun tindak lanjut hasil koordinasi sebagai bahan monitoring BPP Papua Tengah serta koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

5. RAPAT KOORDINASI DAN DIALOG BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BPP/BP3OKP) PERWAKILAN PAPUA TENGAH BERSAMA MENTERI HAK ASASI MANUSIA (HAM) REPUBLIK INDONESIA DI NABIRE, PROVINSI PAPUA TENGAH 17 AGUSTUS 2026

A. Latar Belakang dan Tujuan



Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu provinsi di Tanah Papua yang memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya dan kondisi pembangunan yang sangat kompleks. Dalam proses percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan dasar, kondisi geografis yang sulit, persoalan keamanan, pengungsian akibat konflik, serta

kebutuhan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam situasi tersebut, pembangunan Papua Tengah harus dilaksanakan dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kebijakan pembangunan perlu memastikan bahwa hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, keamanan, pekerjaan, pelayanan publik dan kehidupan yang layak dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan. Kementerian HAM RI pada Agustus 2026 juga menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas dalam penanganan konflik di Papua Tengah.



Pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan perlindungan bagi kelompok rentan, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat kembali ke kampungnya secara aman dan sukarela. Selain itu, Menteri HAM RI dalam kunjungan ke Papua Tengah menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keamanan dan kedamaian, sekaligus bertukar informasi mengenai perkembangan pembangunan di Papua Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pembangunan yang tidak memperhatikan hak masyarakat dapat menimbulkan ketimpangan dan persoalan sosial, sedangkan penghormatan terhadap HAM harus diwujudkan melalui kebijakan dan program pembangunan yang konkret. Kegiatan koordinasi dan dialog ini dimaksudkan sebagai forum strategis antara BPP Papua Tengah dengan Menteri HAM RI untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan serta perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Papua Tengah.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK ini dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Agustus 2026 pada pukul 11.00 s/d 12.00 WIT. Rapat ini bertempat di kantor Setwapres RI di Nabire, Provinsi Papua Tengah.

C. Peserta

Agenda Pertemuan ini dihadiri anggota BPP Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, DPRP Papua Tengah Menteri HAM RI.

D. Hasil Yang di Capai

Berdasarkan pokok pembahasan dan koordinasi yang dilakukan, beberapa hal penting yang menjadi perhatian bersama adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perlindungan HAM. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi bagian integral dari seluruh proses pembangunan di Papua Tengah.
2. Perlindungan Warga Sipil. Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama dalam menghadapi persoalan keamanan dan konflik. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh hak dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, pangan, tempat tinggal dan rasa aman. Kementerian HAM sebelumnya telah menegaskan bahwa perlindungan warga sipil di Papua

Tengah harus menjadi prioritas dan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, lanjut usia dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus.

3. Penanganan Pengungsi. Diperlukan data pengungsi yang akurat, terintegrasi dan dapat diverifikasi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung. Menteri HAM juga menekankan pentingnya penyampaian data pengungsi secara akurat, termasuk jumlah, lokasi, persebaran dan kondisi masyarakat yang terdampak, sehingga dapat menjadi dasar intervensi pemerintah pusat.
4. Penguatan Perdamaian. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana yang aman dan damai sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.
5. Pembangunan Berbasis HAM. Program pembangunan Papua Tengah perlu diarahkan agar tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya OAP dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil serta daerah yang mengalami keterbatasan pelayanan dasar.
6. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah BPP Papua Tengah dan Kementerian HAM RI perlu terus memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan persoalan HAM dan pembangunan.Koordinasi tersebut perlu melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, DPR Papua Tengah, MRP, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan unsur masyarakat lainnya.
7. Penguatan Data dan Informasi. Diperlukan basis data yang akurat mengenai kondisi masyarakat, terutama masyarakat terdampak konflik, pengungsi, kelompok rentan dan masyarakat yang belum memperoleh pelayanan dasar. Data yang valid diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran dapat dipertanggungjawabkan.



BPP

LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS

BULAN AGUSTUS 2026

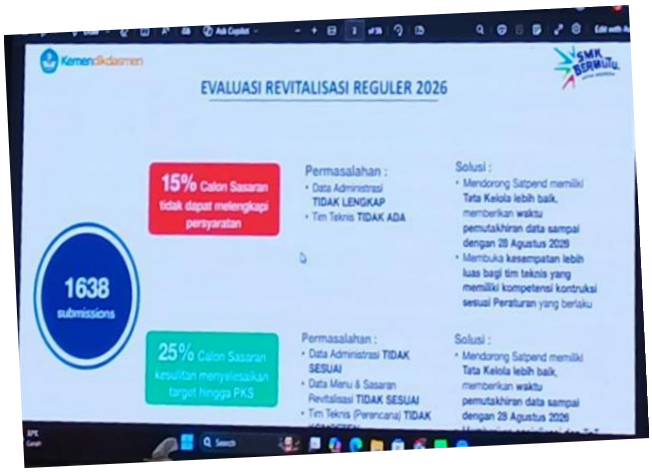
BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA CERDAS
BULAN AGUSTUS

1. PROGRAM PEMERINTAH REVITALISASI SEKOLAH KHUSUS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SE-PAPUA TENGAH

A. Latar Belakang dan Tujuan



Latar belakang pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pendataan ini didasarkan pada program strategis pemerintah mengenai Revitalisasi Sekolah Khusus Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Papua Tengah. Langkah koordinasi ini didukung dengan Surat Tugas Direktur SMK, Kemdikdasmen Nomor 3155/D2/DV.00.01/2026 untuk melaksanakan pendampingan serta pendataan program revitalisasi, dan diperkuat melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Nomor 400.3/569/DKP/VIII/2026 perihal Undangan Rapat. Secara substansi, program ini merupakan bagian integral dari proses transformasi pendidikan berskala nasional yang meliputi aspek pengusulan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga penciptaan dampak inovasi kemajuan pendidikan vokasi. Di samping itu, program revitalisasi ini difokuskan pada upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan serta perluasan akses pendidikan vokasi secara merata, khususnya pada daerah-daerah kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini juga memegang misi penting dalam menjaga zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani, terutama bagi kepala sekolah dan panitia pelaksana agar menjalankan tugas kedinasan secara jujur dan transparan tanpa menerima pemberian dalam bentuk barang, makanan, minuman, maupun bentuk gratifikasi lainnya



Tujuan utama dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan yang akurat bagi kesuksesan program revitalisasi SMK di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah. Selain pengumpulan data, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan intensif kepada pihak pelaksana di satuan pendidikan agar seluruh proses revitalisasi dapat berjalan secara sistematis dan selesai tepat waktu. Terakhir, kegiatan ini bertujuan mengadvokasi para pelaksana revitalisasi di satuan pendidikan demi terwujudnya tata kelola sekolah yang akuntabel, serta memastikan bahwa kepala sekolah beserta panitia pelaksana berkomitmen

penuh menjaga integritas birokrasi tanpa menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun selama mengawal program ini

B. Waktu Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pendampingan dan pendataan program Revitalisasi SMK se-Provinsi Papua Tengah ini telah dilaksanakan secara intensif selama empat hari, yaitu mulai hari Senin sampai dengan Kamis pada tanggal 3 hingga 6 Agustus 2026. Guna menjamin kelancaran koordinasi dan aksesibilitas bagi seluruh pihak, pertemuan ini diselenggarakan secara terpusat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah

C. Peserta



Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri atas unsur kepala sekolah SMK, operator sekolah SMK, 8 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten di wilayah Papua Tengah, serta jajaran perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Guna memberikan pembekalan teknis dan arahan kebijakan yang komprehensif, forum ini menghadirkan narasumber utama yang terdiri dari 4 orang perwakilan dari Direktorat SMK, DIKDASMEN serta didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.

D. Hasil yang Dicapai

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, sejumlah hasil konkret berhasil dicapai demi kemajuan pendidikan vokasi di wilayah Papua Tengah.

1. Hasil pertama adalah tersosialisasinya kegiatan pendampingan dan pendataan untuk program Revitalisasi secara menyeluruh bagi seluruh SMK di Provinsi Papua Tengah;
2. Hasil kedua adalah terinputnya data kebutuhan sarana dan prasarana dari masing-masing SMK secara digital ke dalam aplikasi TAKOLA dan sistem Dapodik secara tertib;
3. Ketiga, telah terlaksana survei lokasi langsung di SMKS YPK Energi dan Pertambangan Nabire oleh tim verifikasi dari Direktorat SMK, Kemdikdasmen Pencapaian berikutnya adalah terpetakannya empat lokus SMK Terintegrasi yang telah ditetapkan oleh BP3OKP Papua Tengah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah sebagai sekolah penyelenggara program SMK Terintegrasi dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Keempat, lokus strategis tersebut meliputi SMKS YPK Energi dan Pertambangan Nabire yang berfokus pada Unit Produksi Air Bersih dan Listrik SMKS YPPK Agrobisnis dan Agroteknologi Nabire dengan fokus Unit Produksi Pakan dan Pupuk SMKS YPPGI Agrobisnis dan Agroteknologi Dogiyai yang mengelola Unit Produksi Ayam Petelur dan Hasil Pertanian, serta SMKS YPPK Agrobisnis dan Agroteknologi Deiyai yang berfokus pada Unit Produksi Ternak Babi Induk dan Pedaging.

2. RAPAT EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TIMIKA TAHUN 2025

A. Latarbelakang dan Tujuan



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah. Pengelolaan APBD harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Timika Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang ditetapkan, diperlukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. Evaluasi tersebut menjadi penting untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian pembangunan yang dihasilkan bagi masyarakat.

Rapat evaluasi ini juga menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Timika dengan perangkat daerah di Provinsi Papua Tengah serta Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP), khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran mendukung program-program prioritas pembangunan dan memberikan manfaat yang nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).



Melalui rapat ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah, capaian program dan kegiatan, kendala dalam pelaksanaan anggaran, serta berbagai permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Hasil evaluasi selanjutnya dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pembangunan di Papua Tengah.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK ini dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2026 pada pukul 11.00 s/d 12.00 WIT. Rapat ini bertempat di kantor dinas pendidikan provinsi papua Tengah

C. Peserta

Agenda Pertemuan ini dihadiri Pokja Papua Cerdas, Dinas Terkait dan Pemkab Mimika.



D. Hasil Yang Dicapai

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Keuangan terhadap pelak sanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Timika Tahun Anggaran 2025 Evaluasi mencakup:

- kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan;
- tingkat realisasi fisik dan keuangan setiap program/kegiatan;
- efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target pembangunan daerah;
- kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target;
- kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- serta langkah penyelesaian terhadap kegiatan yang masih memiliki permasalahan administrasi maupun keuangan.
- Dalam pembahasan ditekankan bahwa tingginya realisasi anggaran harus diikuti dengan pencapaian output dan outcome yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada manfaat program bagi masyarakat.
- BPKAD dan Bapperinda bersama OPD terkait diminta melakukan pencermatan terhadap kegiatan yang realisasi fisiknya belum sejalan dengan realisasi keuangan serta menyusun langkah percepatan dan perbaikan.



BPP

LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT

BULAN AGUSTUS 2026

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN KEGIATAN POKJA PAPUA SEHAT
BULAN AGUSTUS

1. RAPAT KOORDINASI SHEK BPP PAPUA TENGAH, POKJA PAPUA SEHAT DENGAN KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) TERKAIT TINDAK LANJUT HASIL PROGRES KOLABORASI PENANGANAN HIV/AIDS ANTAR LINTAS SEKTOR DI KABUPATEN PANIAI" (TANGGAL 20 AGUSTUS 2026)

A. Latarbelakang dan Tujuan



Sektor kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Di Kabupaten Paniai, penyebaran kasus HIV/AIDS masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus serta langkah penanganan secara cepat, terpadu, dan berkesinambungan. Penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh jajaran lintas sektor. Diperlukan penguatan peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Paniai bersama perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama (Gereja), dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sistem penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melalui Pokja Papua Sehat berkomitmen untuk mengawal, memfasilitasi, dan menyelaraskan program penanggulangan HIV/AIDS agar tepat sasaran, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kasus dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Paniai. Guna memastikan setiap intervensi berjalan efektif, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menyusun pembagian peran, memetakan lokus prioritas, serta memperkuat sinergi penanganan di lapangan. Rapat kordinasi ini bertujuan Meningkatkan dan memperluas jangkauan sosialisasi serta edukasi HIV/AIDS kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berisiko dan kelompok usia produktif,

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi SHEK BPP Papua Tengah (Pokja Papua Sehat) ini dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Tempat : Videocall Whatshaap

D. PESERTA

Pertemuan ini dilaksanakan secara virtual antara Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Dan Pokja Papua Sehat

E. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama dalam Rapat Koordinasi Tanggal 20 Agustus 2026, diperoleh 11 (sebelas) poin hasil tindak lanjut sebagai berikut:

1. Telah laksanakan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Paniai.
2. Telah laksanakan penguatan peran KPA Kabupaten Paniai bersama perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, Gereja dan sektor terkait.
3. Telah menetapkan sasaran dan lokus kasus HIV AIDS paling tertinggi sebagai prioritas penangan HIV AIDS.
4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat, khususnya kelompok berisiko dan kelompok usia produktif.
5. Mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pemeriksaan HIV, konseling, pengobatan, dan pendampingan secara berkesinambungan.
6. Memastikan pasien yang telah terdiagnosis HIV mendapatkan pendampingan dan tetap menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan.
7. Meningkatkan sistem koordinasi dan pelaporan perkembangan program HIV/AIDS antar instansi terkait.
8. Menindaklanjuti kendala yang ditemukan di lapangan melalui pertemuan koordinasi secara berkala.
9. Menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing sektor dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan untuk memastikan setiap rencana tindak lanjut berjalan sesuai target.
11. Menjadwalkan pertemuan koordinasi berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan dan capaian tindak lanjut penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Paniai.

2. RAPAT BP3OKP PAPUA SEHAT DENGAN CALON PESERTA PROGRAM DOKTER SPESIALIS (PPDS) OAP, DENGAN KONTEKS TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER DI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang Dan Tujuan



Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis di Provinsi Papua, diperlukan langkah strategis dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan kedokteran, rumah sakit, serta calon peserta pendidikan dokter spesialis, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Keterbatasan ketersediaan dokter spesialis masih menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Papua. Kondisi geografis, persebaran fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga medis spesialis, serta kebutuhan penguatan pelayanan rujukan menyebabkan pemenuhan dokter spesialis OAP menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan kesehatan Papua.

Sehubungan dengan hasil Rapat Koordinasi Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dokter di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, diperlukan tindak lanjut yang konkret di daerah,

termasuk melakukan koordinasi dan komunikasi langsung dengan calon peserta dokter spesialis OAP.

Rapat antara BP3OKP Papua Sehat dan calon peserta dokter spesialis OAP dilaksanakan sebagai forum untuk menyampaikan hasil koordinasi tersebut, mengidentifikasi kesiapan calon peserta, menggali kendala yang dihadapi, serta menyepakati langkah percepatan proses pendidikan dokter spesialis sampai dengan penempatan dan pengabdian kembali di Papua.

B. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Rapat koordinasi dan pemetaan kesiapan calon peserta dokter spesialis OAP dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat BP3OKP Provinsi Papua Tengah



C. Peserta

Pertemuan penting ini dihadiri oleh para perwakilan calon peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Diskusi dan koordinasi terarah dalam forum ini dipandu dan diselenggarakan langsung oleh POKJA Papua Sehat.

D. Hasil Yang Dicapai

Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, sejumlah capaian penting berhasil diperoleh guna mendukung kelancaran program.

1. Pertama, tersampaikannya hasil rapat koordinasi tingkat pusat mengenai percepatan pemenuhan kebutuhan dokter secara menyeluruh kepada para calon peserta dokter spesialis OAP.
2. Kedua, rapat berhasil mengidentifikasi calon peserta dokter spesialis OAP yang memiliki kesiapan serta memetakan kebutuhan dokter spesialis prioritas berdasarkan kondisi nyata pelayanan kesehatan dan rumah sakit di Papua, sehingga pilihan program spesialisasi calon peserta dapat diarahkan secara tepat guna sesuai kebutuhan daerah.
3. Ketiga, pertemuan ini berhasil mengidentifikasi berbagai kendala utama yang dihadapi calon peserta, yang meliputi hambatan dalam persyaratan administrasi, persyaratan akademik, kendala dalam proses seleksi masuk PPDS, sistem pembiayaan pendidikan, penyediaan biaya hidup dan kebutuhan penunjang selama masa studi, status kepegawaian, hingga mekanisme penugasan kembali setelah menyelesaikan pendidikan.Di samping itu, rapat ini berhasil membangun komitmen bersama yang kuat antara BP3OKP Papua Sehat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta para calon peserta untuk menyukseskan program akselerasi ini.

4. Hasil konkret lainnya adalah tersusunnya daftar calon peserta prioritas yang akan mendapatkan pendampingan dan fasilitasi lebih lanjut, serta disepakatinya mekanisme koordinasi lanjutan secara terstruktur antara BP3OKP, pemerintah daerah, rumah sakit, institusi pendidikan kedokteran, dan instansi terkait lainnya. Terakhir, pertemuan ini berhasil mengamankan komitmen tertulis/moral untuk pengabdian kembali di Papua dari para peserta setelah mereka menyelesaikan masa studi dokter spesialis sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah

E. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pendataan serta verifikasi menyeluruh terhadap seluruh calon peserta PPDS OAP.
2. Memetakan kebutuhan dokter spesialis secara spesifik berdasarkan profil faskes dan rumah sakit di masing-masing kabupaten.
3. Mengoordinasikan sistem penganggaran dan pembiayaan kuliah secara kolaboratif (APBD Kabupaten, Provinsi, dan Kemenkes).
4. Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala untuk memantau progres pelaksanaan program

3. RAPAT SHEK DENGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA TENGAH TERKAIT TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI DI SEKRETARIAT SETWAPRES RI TERKAIT BEASISWA PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS DI PAPUA

A. Latar Belakang



Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Tengah. Salah satu tantangan riil yang dihadapi daerah ini adalah keterbatasan jumlah serta tidak meratanya penyebaran tenaga dokter spesialis di berbagai fasilitas kesehatan. Ketiadaan dokter spesialis yang memadai berdampak langsung pada rendahnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Guna mengatasi kendala tersebut, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI) telah menginisiasi program afirmasi Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai tindak lanjut di daerah, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Tengah melalui Tim Pokja Papua Sehat bergerak cepat mengawal program strategis ini. Langkah cepat ini diperlukan agar kuota beasiswa nasional dapat terserap secara maksimal,

terintegrasi, dan tepat sasaran demi mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Papua Tengah

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengawalan, koordinasi, dan sinkronisasi ini adalah untuk mempercepat penjaringan serta penyampaian usulan resmi calon peserta beasiswa dokter spesialis secara berjenjang dari seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah kepada pemerintah pusat. Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk memastikan terpenuhinya aspek afirmasi dengan memprioritaskan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) yang berdedikasi tinggi, sekaligus mensinkronisasikan pemilihan bidang spesialisasi medis agar selaras dengan peta kebutuhan pelayanan rujukan kesehatan yang mendesak di setiap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Papua Tengah.

B. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2026 bertempat di Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah



C. Peserta dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi Papua Tengah dr. Agus beserta Sekretaris Dinas dan Koordinator POKJA Papua Sehat BP3OKP Papua Tengah.

D. Hasil yang dicapai

Kegiatan koordinasi dan akselerasi ini berhasil mencapai hasil konkret sebagai berikut:

- Terbangunnya Komitmen Sinergi Lintas Sektor: Terwujudnya integrasi kerja yang solid antara BP3OKP Papua Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi, dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mempercepat administrasi pengusulan calon peserta
- Penyampaian Instruksi Resmi ke 8 Kabupaten Target: Surat Edaran telah berhasil didistribusikan secara merata kepada seluruh bupati di wilayah kerja Provinsi Papua Tengah.
- Adanya Komitmen Prioritas OAP: Disepakatinya kebijakan afirmatif di mana pemerintah kabupaten/kota wajib mengutamakan tenaga kesehatan dari kalangan Orang Asli Papua (OAP) yang memenuhi kriteria akademis dan administratif demi efektivitas pemanfaatan dana Otsus.
- Terlaksananya pembinaan agar pengusulan bidang spesialis oleh daerah harus disesuaikan secara cermat dengan peta kebutuhan pelayanan rujukan kesehatan di rumah sakit daerah (RSUD) masing-masing, sehingga mencegah ketidaktepatan penempatan dokter setelah lulus studi.

BPP

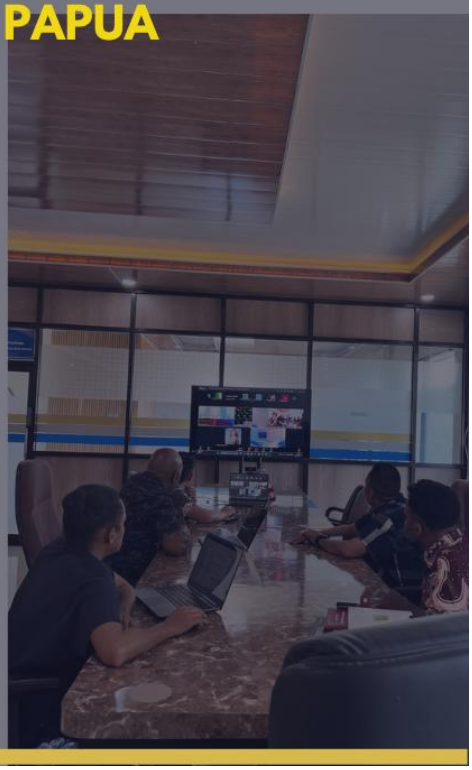
LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF

BULAN AGUSTUS 2026

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH







LAPORAN BULAN AGUSTUS POKJA PAPUA PRODUKTIF
BADAN PENGARAH PAPUA

1. SHEK Pokja Papua Produktif bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah (3 Agustus 2026)

A. Latar belakang dan Tujuan

Sektor perhubungan merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, distribusi barang dan jasa, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di Provinsi Papua Tengah yang memiliki karakteristik geografis yang menantang. Penguatan koordinasi antara BP3OKP dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah menjadi penting untuk menyelaraskan program prioritas, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta menyusun langkah percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan fungsi BP3OKP dalam melakukan SHEK terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.



Kegiatan SHEK bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas bidang perhubungan dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektor transportasi, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sector dan menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut guna meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK ini dilaksanakan pada hari Senin, 3 Agustus 2026 pada pukul 11.00 s/d 12.00 WIT. Rapat ini bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.

C. Peserta

Agenda Pertemuan ini dihadiri oleh Pokja Papua Produktif dan Sekretaris Dinas.

D. Hasil Yang Dicapai

Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Dinas menyampaikan beberapa program pembangunan sektor transportasi beserta berbagai kendala yang dihadapi, terutama terkait kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan pembiayaan sehingga melalui Pokja Papua Produktif menyampaikan untuk mengatasi tersebut diperlukan koordinasi lintas pihak. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta BP3OKP agar pembangunan infrastruktur transportasi lebih terintegrasi terutama daerah- daerah sentra penghasil komoditas unggulan daerah. Melalui pertemuan ini langkah – langkah strategis yang akan dirumuskan bersama dalam Rapat Koordinasi Kerja yang akan dilaksanakan oleh BP3OKP dengan melibatkan Dinas Terkait, Kementerian dan Lembaga untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi sehingga

pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

E. Rencana Tindaklanjut

a. BP3OKP akan melakukan Rapat Kerja Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire.
b. Dalam Rapat Kerja Dinas Perhubungan akan memaparkan Program Prioritas dalam mendukung percepatan pembangunan transportasi di Provinsi Papua Tengah.
c. Hasil Rapat SHEK akan menyusun dan mengawal rekomendasi-rekomendasi percepatan pembangunan dibidang perhubungan darat, udara dan laut dalam konektivitas di 8 Kabupaten.

2. SHEK Pokja Papua Produktif bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESM Provinsi Papua Tengah (5 Agustus 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan



Proses pembangunan akan berjalan diperlukan koordinasi dan kolaborasi kerja berbagai pihak. BP3OKP Papua Tengah melalui Pokja Papua Produktif melakuan pertemuan bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESM, koordinasi ini penting untuk menyelaraskan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan angka pengangguran, pengembangan tenaga kerja yang kompeten, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui rapat koordinasi ini dilakukan pembahasan mengenai strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan pelatihan vokasi, peluang kerja bagi Orang Asli Papua, serta pengembangan investasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Tengah.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan Pokja Papua Produktif dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESM dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2026 pada pukul 09.30.00 s/d 10.30 WIT bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas.

C. Peserta

Peserta yang hadir dalam koordinasi kerja adalah Pokja Papua Produktif dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Tengah.

D. Hasil Yang Dicapai

Dari hasil koordinasi yang dilakukan Pokja Produktif bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESM Provinsi Papua Tengah dihasilkan beberapa kesepahaman diantaranya menghasilkan komitmen untuk memperkuat koordinasi antara BP3OKP dan Disnakertrans ESDM dalam



mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi daerah. Diketahui pula bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & ESDM telah melakukan langkah konkrit untuk mengatasi tingkat pengangguran di Papua Tengah dengan menjalankan program strategis berupa pelatihan ketrampilan kerja bagi sejumlah pemuda di Papua Tengah kegiatan tersebut meliputi pelatihan pengelasan, otomotif, menjahit, budidaya perikanan (bioflok), komputer, barista, servis telepon genggam, dan kewirausahaan. Disampaikan juga bahwa pembinaan pasca pelatihan perlu didukung melalui penyediaan sarana usaha, pendampingan, dan akses pemasaran agar peserta mampu bekerja maupun berwirausaha secara mandiri disamping itu pentingnya penguatan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Berdasarkan hasil diatas Pokja Papua Produktif mendorong agar ada kontinuitas dari program pelatihan kerja dengan menciptakankan suatu ekosistem usaha seperti Pembentukan BUMD untuk dapat menyerap tenaga kerja terlatih, selain hal tersebut untuk menekan angka pengangguran penciptaan inkubator wirausaha / bisnis merupakan langkah yang tepat dalam rangka pembinaan dan pendampingan kepada calon wirausahawan untuk mengembangkan, menambah wawasan, dan meningkatkan daya saingnya. inkubator bisnis juga berperan dalam pengoptimalan dan pemanfaatan sumber daya manusia agar memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diperoleh melalui pelatihan-pelatihan kerja untuk menggerakan perekonomian daerah.

E. Rencana Tindak Lanjut

1. Memperkuat koordinasi antara BP3OKP dan Disnakertrans ESDM dalam penyusunan program peningkatan kompetensi tenaga kerja.
2. Mendorong optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
3. Mendorong percepatan pengembangan investasi dan kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap program pembangunan dan investasi memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Papua Tengah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat adat.
5. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelatihan, magang, sertifikasi, dan penempatan kerja bagi Orang Asli Papua.

3. MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT KOORDINASI, SINKRONISASI PROGRAM KERJA GUBERNUR DALAM RANGKA PEMBANGUNGAN SEKTOR PERKEBUNAN KOPI DAN SEKTOR PETERNAKAN (PEMBIBITAN TERNAK) DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH. (10 AGUSTUS 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan



Sektor pertanian khususnya perkebunan dan peternakan, merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah. Sektor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pangan, menyediakan bahan baku industri, serta menciptakan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Provinsi Papua Tengah memiliki potensi komoditas perkebunan dan peternakan yang cukup besar dan beragam. Pada sektor perkebunan, komoditas yang menjadi prioritas antara lain kopi, kakao, kelapa dan sagu, sedangkan sektor peternakan mencakup antara lain sapi, babi, kambing dan unggas. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan bibit bermutu, produktivitas yang belum optimal, kelembagaan petani yang perlu diperkuat, infrastruktur produksi dan pascapanen, akses pasar, serta kualitas dan validitas data petani, lahan dan populasi ternak. Melalui Rapat koordinasi ini dapat meningkatkan koordinasi pembangunan sektor perkebunan dan peternakan di 8 kabupaten se-Provinsi Papua Tengah dan menyelaraskan program dan kebijakan pengembangan komoditas unggulan daerah serta mendorong pengembangan kopi Papua Tengah dari sektor hulu sampai hilir

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi berlangsung pada hari Senin, 10 Agustus 2026 pada pukul 10.00 s/d 18.00 WIT bertempat di Hotel Karmel, Nabire.

C. Peserta

Rakorda ini dihadiri oleh Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi, Papua Tengah, Pokja Papua Produktif, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah, Kabid, Kasie dan Staf di lingkungan Disbunak, Kepala BRMP Papua Tengah dan Kabid, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan atau pejabat yang mewakili dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

D. Narasumber

Narasumber yang dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi adalah Direktur Pembenihan Perkebunan Dirjenbun Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah, Kabsubbag dari BRMP Papua Tengah, SCOPI (Sustainable Coffee Platform of Indonesia)

E. Hasil Yang Dicapai



Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan RAKORNIS Program Kerja Gubernur adalah Pembangunan perkebunan dan peternakan diarahkan untuk membangun ekosistem usaha yang terintegrasi, bukan hanya berorientasi pada penyaluran bantuan. Alurnya mencakup benih/bibit, lahan, petani/peternak, budidaya, pendampingan, pascapanen, pengolahan, pasar dan kemitraan. Komoditas perkebunan yang menjadi prioritas antara lain kopi, kakao, kelapa dan sagu**,** sedangkan peternakan diarahkan pada pengembangan sapi, babi, kambing dan unggas sesuai potensi wilayah. Data menjadi dasar dalam menentukan program kerja antara lain identitas petani/peternak, lokasi, koordinat, luas lahan, komoditas, jumlah tanaman, umur tanaman, produksi, populasi ternak dan status bantuan pemerintah. CPCL menjadi instrumen penting dalam pengendalian bantuan dengan tahapan pengusulan CPCL, verifikasi, validasi, penetapan, distribusi, monitoring dan evaluasi**.** pengusulan dapat dilakukan melalui penyuluh maupun dinas kabupaten**,** kemudian diproses melalui tahapan verifikasi sampai dengan penetapan bantuan. Penggunaan aplikasi e-Banper juga akan semakin diperlukan dalam proses pengusulan dan pengelolaan bantuan pemerintah.

Strategi pengembangan Kopi Papua Tengah menyampaikan bahwa pengembangan kopi harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari hulu hingga hilir. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi kesesuaian lahan, varietas unggul, pemangkasan, pengelolaan kesuburan tanah, pengendalian hama dan penyakit, pemetikan buah yang baik, serta pascapanen. Kualitas kopi juga sangat dipengaruhi oleh varietas, lingkungan tumbuh, pohon penaung, kesehatan tanaman, mutu petik dan metode pascapanen.

4. SHEK POKJA PAPUA PRODUKTIF BERSAMA DINAS PERTANIAN, BRMP PAPUA TENGAH, KELOMPOK TANI MERDEKA. DALAM RANGKA PANEN JAGUNG DI KAMPUNG BUMI MULIA. (19 AGUSTUS 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan dan penguatan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Pengembangan produksi jagung membutuhkan dukungan yang terintegrasi, mulai dari kesiapan lahan, ketersediaan benih, pupuk dan pengendalian hama, sarana dan alat pertanian, pendampingan, hingga kepastian pasar. Dalam rangka melihat secara langsung perkembangan produksi jagung masyarakat, telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan koordinasi bersama Kelompok Tani Merdeka di Kampung Bumi Mulia, Wanggar. Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan panen jagung serta dialog dengan anggota kelompok mengenai kondisi produksi, jumlah anggota aktif, kebutuhan sarana produksi, kendala akses jalan, dan pemasaran hasil panen. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara kelompok tani, penyuluh, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan

jagung tidak berhenti pada kegiatan produksi, tetapi dapat berlanjut sampai pengolahan dan pemasaran hasil.



Kegiatan SHEK lintas pihak dalam rangka Panen Raya Jagung bertujuan untuk mengetahui kondisi produksi jagung Kelompok Tani Merdeka secara langsung melalui kunjungan lapangan dan panen, disamping itu untuk mengidentifikasi jumlah anggota dan petani yang aktif dalam kegiatan produksi jagung, menginventarisasi kebutuhan dan masalah kelompok berupa benih/bibit, pupuk, obat atau pengendalian hama, serta alat dan mesin pertanian, beberapa masalah lainnya berupa akses jalan dan pengangkutan sarana produksi maupun hasil panen dan pemasaran merupakan masalah utama di hilir sehingga koordinasi dan dukungan Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya diperlukan dalam penyediaan akses pasar bagi hasil produksi jagung di Papua Tengah

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan SHEK dalam rangka Panen Raya Jagung dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2026 pada pukul 10.00 – 12.30 WIT berlokasi di Kebun Jagung Kelompok Tani Salera Gunung, Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar.

C. Peserta

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pokja Produktif, Kepala BRMP Papua Tengah, Kepala BPP Wanggar, Staf Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Staf BRMP Papua Tengah, PPL di wilayah Distrik Wanggar, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah, Anggota Kelompok Tani Salera Gunung

D. Hasil Yang Dicapai



Kegiatan SHEK dalam rangka Panen Raya Jagung di Kelompok Tani Salera Gunung diperoleh beberapa hasil diantaranya Tani Merdeka Indonesia adalah sebuah organisasi usulan dari para Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Tokoh Tani, Pemerhati Tani, Kelompok Perikanan, dan Kelompok Peternakan di Indonesia. DWP Tani Merdeka Provinsi Papua Tengah di Ketuai Oleh Bp. Aser Yogi. Salera Gunung merupakan anggota Tani Merdeka yang telah mengakses bantuan benih jagung hibrida dan pendampingan dari BPP Distrik Wanggar dimana Kelompok Tani “Salera Gunung” telah melakukan

usahatani jagung dan sudah beberapa kali panen jagung selain itu anggota kelompok tani memiliki kemauan untuk terus maju namun masih menghadapi beberapa keterbatasan sarana produksi dan pendukung lainnya.

SHEK yang dilaksanakan oleh Pokja Papua Produktif dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis, Kementerian / Lembaga yang turut hadir, melalui agenda kegiatan tersebut Pokja Papua Produktif mendorong agar koordinasi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung petani jagung Orang Asli Papua dengan pendekatan dari hulu sampai hilir, yaitu penyediaan benih, pupuk dan pengendalian hama, peningkatan produksi, panen, pengolahan, hingga pemasaran. Berdasarkan belanja masalah dilapangan maka Pokja Papua Produktif akan melakukan Rapat Koordinasi Kerja dengan BRMP Papua Tengah, Dinas Pertanian dan PPL untuk menyusun langkah-langkah strategis yang menyelesaiakan kendala yang terjadi dilapangan, SHEK ini bertujuan agar tercipta sinkronisasi program APBN, APBD, Dana Otsus dan sumber pembiayaan lainnya dalam mendukung pengembangan produksi jagung saling melengkapi dan tidak terjadi tumpeng tindih serta tepat sasaran.

E. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam rangka percepatan dan pengawasan pembangunan otonomi khusus (Otsus) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan maka BP3OKP merasa perlu melakukan Rapat Koordinasi Kerja bersama BRMP Papua Tengah untuk memastikan program kerja dalam mempersiapkan data dasar calon petani calon lokasi (CPCL) yang sesuai dengan aplikasi e-banper dan simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian).
2. BP3OKP melalui Pokja Papua Produktif akan menindaklanjuti hasil temuan masalah dilapangan dengan melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan pasar bagi komoditas jagung di Provinsi Papua Tengah dengan melakukan penjajakan pasar melalui perjanjian kerjasama sehingga produk jagung pipilan dapat diserap oleh pasar salah satunya Perum Bulog atau mitra pasar lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
3. Berdasarkan hasil pemetaan kondisi dan permasalahan dilapangan, Pokja Papua Produktif akan mendorong sinkronisasi program APBN, APBD, Dana Otsus, dan sumber pembiayaan lainnya agar dukungan terhadap produksi jagung saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih melalui Rapat Koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait dalam dukungannya di bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan, perikanan, dan peternakan.

5. SHEK BP3OKP BERSAMA BRMP PROVINSI PAPUA TENGAH. (26 AGUSTUS 2026)

A. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masarakat di Provinsi Papua Tengah, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dengan instansi teknis yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pertanian serta pengembangan inovasi teknologi pertanian. Badan Riset dan Inovasi Pertanian (BRMP) Provinsi Papua Tengah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pertanian melalui penerapan hasil riset, inovasi, teknologi, serta peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Kondisi geografis Papua Tengah yang memiliki karakteristik wilayah, sosial budaya, serta sistem pertanian yang beragam

memerlukan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.



Oleh karena itu, kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) antara BP3OKP dengan Kepala BRMP Provinsi Papua Tengah dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan program dan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang dapat memperkuat pembangunan sektor pertanian di Provinsi Papua Tengah. Tujuan SHEK bersama adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara BP3OKP dengan BRMP Provinsi Papua Tengah dan melalui penyelarasan program pembangunan pertanian dengan kebutuhan masyarakat di Papua Tengah dan kemudian pengidentifikasian potensi dan permasalahan dalam pengembangan sektor pertanian diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah kerja strategis lintas sektor dalam mendorong penerapan inovasi dan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah Papua Tengah sesuai amanat Otonomi Khusus (OTSUS) yaitu meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas petani Orang Asli Papua (OAP).

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat SHEK dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Agustus 2026 pukul 14.30.00 s/d 17.30 WIT bertempat di Ruang Kerja Kepala BP3OKP Papua Tengah.

C. Peserta

Rapat ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pokja Produktif dimana dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ketua BP3OKP, Pokja Papua Produktif, Kepala BRMP Papua Tengah, Perwakilan Yayasan Bengkel Kerja Papua, Staf BRMP.

D. Hasil Yang Dicapai

Dari hasil SHEK BP3OKP bersama BRMP Papua Tengah diperoleh beberapa capaian diantaranya koordinasi yang lebih intensif antara BP3OKP, BRMP, Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah terkait agar program pembangunan pertanian dapat berjalan secara terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih program. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka BP3OKP mendorong agar Dinas dan Badan yang terkait perlu melakukan belanja masalah untuk mengetahui setiap kebutuhan dari masyarakat tani yang tersebar di kampung-kampung sehingga program kerja yang disusun dapat dilaksanakan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian Pengembangan komoditas pertanian perlu disesuaikan dengan potensi wilayah, kondisi agroekosistem, kebutuhan masyarakat, serta peluang pasar. Komoditas yang memiliki potensi ekonomi perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk pendampingan, teknologi, peningkatan kualitas produksi, dan akses pasar. Melalui Pokja Produktif menyampaikan agar dalam proses pemberdayaan masyarakat tani Orang Asli Papua diharapkan ada ruang yang cukup dalam keterlibatan petani OAP sebagai pelaku utama

ekonomi produktif oleh sebab itu Pokja Papua Produktif mendorong agar setiap petani yang berada di kampung memperoleh kemudahan dalam penginputan data sebagai syarat administrasi pada aplikasi e-banper atau simluhtan sebagai CPCL yang dapat mengakses setiap bantuan.

E. Rencana Tindak Lanjut



1. BP3OKP akan melakukan Rapat Kerja Koordinasi lanjutan dengan BRMP Papua Tengah dan Tenaga Penyuluh Lapangan (PPL) di Papua Tengah
2. Menyiapkan surat pengantar dari BP3OKP ke Gubernur Papua Tengah untuk menghimbau SKPD Terkait dalam rangka memfasilitasi petani OAP untuk memperoleh dokumen KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan dari Kementrian Pertanian.
3. Hasil Rapat SHEK akan menyusun dan mengawal rekomendasi-rekomendasi percepatan pembangunan dibidang Pertanian di Provinsi Papua Tengah.
4. Melakukan identifikasi kebutuhan teknologi dan inovasi pertanian pada wilayah sasaran.
5. Menentukan komoditas pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi petani dan kelompok tani terutama petani OAP melalui penyediaan Balai Pelatihan Pertanian / UPTD Pelatihan Pertanian dan Balai Benih Induk di Provinsi Papua Tengah melalui koordinasi kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala.



BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN KELOMPOK KERJA PAPUA POLHUKAM

BULAN AGUSTUS 2026

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH



LAPORAN BULANAN POKJA PAPUA POLHUKAM (PAPUA DAMAI)
BADAN PENGARAH PERCEPATAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)

1. LAPORAN RINGKAS KEGIATAN SINKRONISASI, HARMONISASI, EVALUASI, DAN KOORDINASI (SHEK) BP3OKP BERSAMA BADAN KESBANGPOL PROVINSI PAPUA TENGAH – 12 AGUSTUS 2026

A. Latar Belakang dan Tujuan



Dalam rangka menjamin stabilitas keamanan sebagai fondasi mutlak keberhasilan Otonomi Khusus di Papua Tengah, Pokja Polhukam BP3OKP bersama Kesbangpol menyelenggarakan rapat koordinasi strategis ini

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah penanganan konflik horizontal di Kwamki Narama, mengatasi kebuntuan sengketa batas adat Kapiraya secara netral, serta merumuskan regulasi penataan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) demi mencegah dualisme kepemimpinan adat di daerah

B. Tempat Kegiatan dan Peserta

Kegiatan koordinasi tatap muka ini dilaksanakan pada hari / tanggal: Rabu, 12 Agustus 2026. Tempat: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Nabire. Pihak yang Hadir: Anggota Pokja Polhukam BP3OKP Provinsi Papua Tengah (di antaranya Kombespol (P) Drs. AJB Maturbongs, S.H. dan Christoforus Valentino AP, S.H., M.H.) bersama Jajaran Pimpinan Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah.

C. Hasil Yang Dicapai



Terkait penanganan konflik horizontal di Kwamki Narama (Kabupaten Mimika), pertemuan mengonfirmasi adanya kesepakatan damai yang telah dimediasi bersama MRP, Keamanan TNI/POLRI, Pemprov, dan Pemkab Mimika dan unsur Forkopimda lainnya.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memutus rantai denda adat, disepakati komitmen penting bahwa apabila terjadi insiden baru di masa mendatang, penyelesaian perkara wajib langsung dialihkan ke ranah hukum pidana umum, dengan tetap melakukan pengawasan ketat serta program rekonsiliasi masif di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, terkait mengenai proses harmonisasi batas wilayah adat Kapiraya (sengketa batas antara Mimika, Deiyai, dan Dogiyai) masih terhambat karena Pemkab Mimika belum menyerahkan data peta wilayah adat resmi kepada Tim Harmonisasi Provinsi.

Guna mencairkan kebuntuan komunikasi akibat kekhawatiran bias primordial (dominasi suku Mee dalam tim harmonisasi), Kesbangpol merekomendasikan Wakil Gubernur Papua Tengah untuk bertindak langsung sebagai penengah/mediator netral

Pada pemetaan stabilitas wilayah, Kabupaten Puncak dan Intan Jaya diklasifikasikan sebagai daerah berkategori rawan tinggi. Kasus anarkis perusakan dan

pembakaran kantor PEMDA di Kabupaten Puncak pada 11 Agustus 2026 akibat polemik alokasi dana desa saat ini sedang diselidiki aparat penegak hukum, sedangkan penanganan pengungsi di Intan Jaya terus dimitigasi secara sinergis melalui Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Provinsi Sementara untuk Kabupaten Deiyai, kerawanan lebih condong pada konflik sosial murni, dan Kabupaten Dogiyai memiliki kerentanan konflik sosial dengan riwayat gangguan keamanan skala sedang

Terakhir, untuk menertibkan fenomena maraknya LMA baru akibat kemudahan pendaftaran online nasional yang memicu dualisme kepengurusan adat, Kesbangpol tengah merumuskan draf regulasi daerah (Perdasi/Perdasus) serta mengimbau suku-suku besar menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) kepala suku yang sah untuk melegitimasi figur kepemimpinan adat.

D. Rencana Tindak Lanjut

BP3OKP akan melaksanakan **kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Mimika** guna bertemu dengan Forkopimda, Badan Kesbangpol, dan DPRK Mimika. Kunjungan SHEK secara langsung ini difokuskan untuk mengurai hambatan taktis di lapangan serta mendesak penyerahan peta wilayah adat Kapiraya oleh Pemerintah Kabupaten Mimika guna mempercepat proses rekonsiliasi

2. LAPORAN RINGKAS KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 DI KOTA TIMIKA - 13-16 AGUSTUS 2026

A. Latar Belakang Dan Tujuan



Dalam rangka menjamin akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran penyaluran Dana Hibah Pendidikan Tahun Anggaran 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Pokja Polhukam BP3OKP terlibat aktif sebagai mitra strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan di lapangan

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memverifikasi secara langsung pencairan dana hibah pada lima perguruan tinggi di Kota Timika, mengonfirmasi mekanisme distribusi dana kepada mahasiswa penerima bantuan, mengidentifikasi kendala teknis sistem pembayaran yang dihadapi kampus, serta menghimpun masukan konstruktif demi perbaikan tata kelola kebijakan bantuan pendidikan di masa mendatang.

B. Tempat Kegiatan dan Peserta



Kegiatan pemantauan *langsung (on-site visit)* ini dilaksanakan pada: Hari / Tanggal: Kamis – Minggu, 13–16 Agustus 2026. Tempat: Lima Perguruan Tinggi di Kota Timika (Poltekkes Kemenkes Prodi Kebidanan Mimika, Poltekkes Kemenkes Prodi Sanitasi Mimika, Poltekkes Keperawatan Timika, STKIP Hermon Mimika, dan STIE Jambatan Bulan)

Pihak yang Hadir: Anggota Pokja Polhukam BP3OKP Provinsi Papua Tengah (KBP (P) Pol. Drs. A.J.B Maturbongs, S.H. dan Christoforus Valentino A.P., S.H., M.H.) bersama tim pendamping, jajaran manajemen pengelola perguruan tinggi, serta perwakilan mahasiswa penerima manfaat bantuan.

Untuk tiap-tiap kampus penerima bantuan diwakili oleh pimpinan masing-masin yang terdiri dari Kampus Poltekkes Kemenkes Prodi Kebidanan Mimika, Poltekkes Kemenkes Prodi Sanitasi Mimika, Poltekkes Keperawatan Timika, STKIP Hermon Mimika, dan STIE Jambatan Bulan.

C. Hasil Yang Dicapai



Hasil monitoring di lapangan menunjukkan bahwa seluruh dana hibah tahun 2025 untuk lima perguruan tinggi di Kabupaten Mimika telah tersalurkan dengan baik dan dicairkan secara utuh

Dana tersebut secara umum digunakan untuk pembiayaan SPP/UKT mahasiswa serta biaya kuliah praktik berdasarkan kebutuhan masing-masing program studi

Penyaluran bantuan dana Pendidikan dilakukan dengan mentransferkan dana yang diterima berdasarkan jumlah bantuan yang telah ditetapkan ke rekening Kampus. Namun, mahasiswa penerima tetap memegang kendali atas rekening tersebut melalui system aplikasi perbankan. Implementasi sistem pembayaran berbasis aplikasi internal kampus dinilai sangat efektif dalam menjamin transparansi dan tepat sasaran, sebab setiap transaksi wajib melalui konfirmasi langsung oleh mahasiswa di dalam aplikasi mereka masing-masing. Sisi lain, dana bantuan tersebut tetap berada di rekening kampus sehingga potensi untuk disalahgunakan penerima bantuan dapat dihindari.

Tantangan yang dihadapi Adalah terkait waktu pencairan dana yang baru terealisasi pada akhir bulan Desembe. Pihak manajemen kampus telah mengambil langkah inisiatif dengan menalangi biaya studi terlebih dahulu tanpa membebani mahasiswa dengan tagihan tambahan yang nantinya saat dana bantuan telah disalurkan, akan dikonfirmasi ke mahasiswa-mahasiswa penerima untuk dipotongkan secara langsung, sehingga keberlangsungan kegiatan akademik mahasiswa tetap terjamin berjalan lancer



Terkait profil penerima manfaat, program bantuan ini didominasi oleh mahasiswa Non-OAP dikarenakan sebagian besar mahasiswa OAP di perguruan tinggi sasaran telah memperoleh bantuan beasiswa penuh dari sumber pendanaan lain (seperti KIP dan YPMAK); langkah pengawasan selektif ini terbukti efektif untuk menghindari terjadinya duplikasi pendanaan *(double funding)*.

Secara menyeluruh, program hibah ini dinilai memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi mahasiswa dan menopang kelangsungan operasional perguruan tinggi di wilayah Papua Tengah.

3. LAPORAN RINGKAS KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 – 18 AGUSTUS 2026

A. Latar Belakang dan Tujuan



Guna menjamin stabilitas pelayanan kesehatan dasar serta keberhasilan integrasi Otonomi Khusus di Papua Tengah, Pokja Polhukam BP3OKP bersama segenap instansi lintas sektoral menyelenggarakan rapat koordinasi strategis Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Forum komunikasi dan kemitraan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepesertaan JKN pasca-penonaktifan massal peserta PBI JK, menyinkronkan tata kelola Program Kartu Ko Sehat (didanai Otsus) sebagai jaring pengaman kesehatan Orang Asli Papua (OAP), memetakan pemenuhan tenaga medis dan akreditasi puskesmas kondisi khusus, serta merumuskan penyelesaian tunggakan anggaran iuran daerahprogram bantuan asrama dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan koordinasi tatap muka ini dilaksanakan pada: Hari / Tanggal: Selasa, 18 Agustus 2026. Tempat: Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Nabire.

C. Peserta

Pihak yang Hadir: Asisten I, II, dan III Gubernur Papua Tengah, Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Deputi Direksi Wilayah XII beserta tim, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, serta perwakilan instansi lintas sektoral yang meliputi Pokja Polhukam BP3OKP, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas PTSP, BPPKAD, Bapperida, Inspektorat, Direktur RSUD Nabire, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Biak Numfor, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Nabire, dan Kepala UPTD Puskesmas Siriwini.

D. Hasil Yang Dicapai



Meskipun cakupan kepesertaan JKN (Universal Health Coverage) di Papua Tengah telah mencapai 117,06% secara administratif per 1 Agustus 2026, tingkat keaktifan peserta menurun menjadi 95,82% akibat dampak langsung penonaktifan massal peserta PBI JK berdasarkan SK Mensos No 3/HUK/2026 (mengalami penurunan drastis dari 1,59 juta jiwa pada Januari menjadi 1,30 juta jiwa pada Juli 2026), sehingga disepakati langkah reaktivasi segera oleh pemerintah daerah.



Guna mensinergikan jaminan kesehatan daerah dengan JKN, Dinas Kesehatan mereposisi Program **Kartu KO Harus Sehat Papua Tengah** bersumber dana Otsus ke dalam tiga pilar utama: preventif di hulu melalui optimalisasi puskesmas, perlindungan akses medis di tengah berupa integrasi jaminan (mengover 50.000 warga dengan anggaran Rp22,7 Miliar, di mana 44.720 jiwa di antaranya adalah OAP), serta perlindungan kedaruratan di hilir sebagai jaring pengaman murni *(safety net)* khusus bagi OAP.

Di sisi fasilitas kesehatan, terdapat tantangan operasional berat karena 67 Puskesmas belum terakreditasi namun mendapatkan relaksasi kondisi khusus dari Kementerian Kesehatan, serta terdapat 48 FKTP yang sama sekali tidak memiliki dokter umum dan dokter gigi

Masalah ini ditambah dengan kelangkaan dokter spesialis yang sangat krusial di RSUD rujukan Nabire dan RSUD Paniai, sehingga disepakati bahwa pemenuhan dokter menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

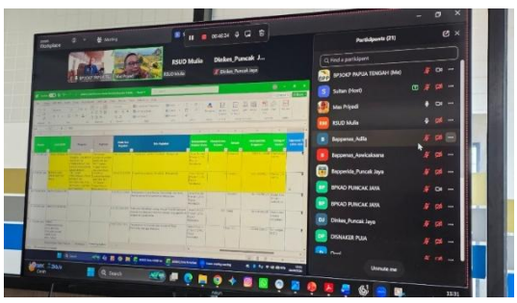
Dari segi pengelolaan anggaran, rapat memaparkan secara transparan kekurangan anggaran jaminan kesehatan tahun 2026 berjalan sebesar Rp13,08 Miliar serta adanya sisa kekurangan pembayaran/tunggakan iuran pemda sebesar Rp8,57 Miliar per Juli 2026

Menanggapi hal tersebut, BPPKAD berkomitmen untuk segera memproses penyelesaian pembayaran tunggakan demi menjaga status keaktifan kepesertaan Masyarakat. Pada aspek administrasi dan pengawasan, Dinas Dukcapil dan PTSP menyepakati integrasi penggunaan NIK/KTP sebagai identitas tunggal pelayanan prima JKN bagi OAP agar dapat dilayani di seluruh faskes Indonesia

Terakhir, dirumuskan pula usulan teknis berupa *dropping* distribusi obat secara langsung ke Ibu Kota Provinsi (Nabire) untuk mempercepat rantai pasok ke faskes daerah terpencil, serta penegasan komitmen Inspektorat untuk mengawasi dan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan dana bantuan/hibah BPJS.

4. LAPORAN KEGIATAN POKJA POLHUKAM TERKAIT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN MUSRENBANG OTSUS – 19-21 AGUSTUS 2026

A. Latar Belakang dan Tujuan



Guna menindaklanjuti temuan Kementerian PPN/Bappenas terkait adanya deviasi perencanaan di mana indeks keselarasan program pembangunan daerah se-Papua Tengah terhadap Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 rata-rata baru mencapai 57% serta menindaklanjuti Surat Atensi Pencegahan Korupsi dari KPK tanggal 8 Juli 2026 mengenai masih tingginya risiko kebocoran dan ketidaktepatan sasaran belanja Otsus, Pokja Polhukam BP3OKP terlibat aktif dalam mengawal asistensi teknis perbaikan dokumen perencanaan ini

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali draf usulan Pembangunan di Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten lain agar indeks keselarasan dapat ditingkatkan secara optimal hingga mencapai target 100%, memantapkan tata kelola perencanaan penganggaran yang transparan dan bebas korupsi, menyaring serta membersihkan usulan non-Otsus dari pos belanja rutin kedinasan demi memprioritaskan program strategis kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), serta merumuskan komitmen

bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (BAK) formal untuk dikunci pada aplikasi SIPPP guna mencegah manipulasi anggaran secara sepihak pasca-asistensi.



B. Tempat Kegiatan

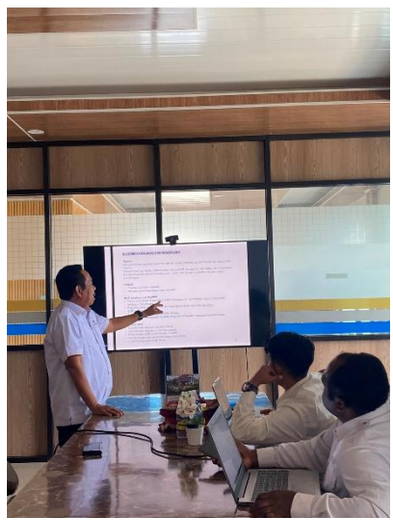
Rangkaian kegiatan asistensi dan pendampingan teknis ini dilaksanakan pada: Hari / Tanggal: Rabu – Jumat, 19–21 Agustus 2026 Waktu: Pukul 08.00 WIT s.d. Selesai.

Tempat: Ruangan Rapat BP3OKP Provinsi Papua Tengah (diikuti secara daring penuh melalui aplikasi Zoom Meeting. Pembukaan Acara berpusat secara luring di Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari dan Untuk pendampingan asistensi Wilayah Nabire bertempat di Ruang VIP- Restoran Jakarta Nabire)

C. Peserta

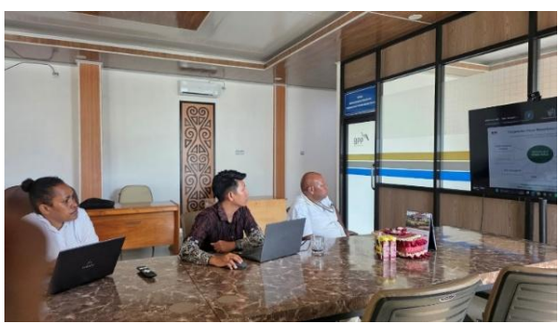
Pihak yang Hadir: Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Polhukam BP3OKP Provinsi Papua Tengah (di antaranya Kombespol (P) Drs. AJB Maturbongs, S.H. dan Christoforus Valentino AP, S.H., M.H.). Pelaksanaan asistensi dilaksanakan oleh tim Asistensi Nasional, kementerian teknis terkait, Perwakilan KPK, serta jajaran dinas-dinas teknis perencana dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten administratif di bawahnya.

D. Hasil yang Dicapai



Melalui pendampingan teknis dan pengawasan melekat yang ketat, program-program kerja daerah telah berhasil direformasi secara mendalam agar selaras dengan pilar strategis RIPPP dan RAPPP 2025–2029, dengan mengintegrasikan langsung rekomendasi dari Bappenas, Kementrian Keuangan, BP3OKP dan KPK.

Program di tingkat kabupaten difokuskan secara spesifik berdasarkan karakteristik daerah masing-masing: Kabupaten Nabire diarahkan pada penguatan infrastruktur dan layanan RSUD Nabire sebagai pusat rujukan medis utama wilayah adat Meepago; Kabupaten Mimika dialihkan dari belanja rutin dinas ke arah penguatan SDM lokal melalui pengutamaan pusat pelatihan kerja vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pertambangan daerah; sementara untuk daerah yang menghadapi tantangan stabilitas keamanan yang tinggi seperti Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, dirumuskan jaminan keselamatan serta dukungan operasional bagi guru dan tenaga medis yang merupakan garda terdepan guna memastikan pelayanan dasar tetap berjalan aman. Untuk Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai, usulan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi riil OAP melalui sektor pertanian dan perkebunan rakyat berupa penyediaan





bibit unggul serta akses pemasaran; sedangkan untuk Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya, pendampingan berhasil memperbaiki kesalahan input data anggaran pada sistem informasi perencanaan serta mempertegas pemisahan antara Dana Otsus khusus dengan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) fisik skala besar.

Hasil konkret paling signifikan adalah mengeliminasi ratusan usulan program rutin kedinasan yang bersifat non-Otsus (seperti biaya perjalanan dinas ASN, pemeliharaan gedung kantor operasional, dan pengadaan kendaraan dinas pimpinan daerah) untuk dikembalikan pembiayaannya pada APBD murni daerah, yang selanjutnya dikunci secara otomatis dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan (BAK) formal pada aplikasi SIPPP guna mencegah terjadinya perubahan anggaran sepihak.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

- **BP3OKP merekomendasikan pimpinan untuk menyurati Gubernur Papua Tengah** agar menginstruksikan seluruh Sekretaris Daerah di delapan kabupaten guna mengawal ketat komitmen hasil asistensi dalam Berita Acara Kesepakatan demi menghindari adanya pergeseran program di kemudian hari.
- **Pemerintah daerah se-Papua Tengah didesak untuk mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah selaku APIP** dalam melakukan reviu kepatuhan dokumen persyaratan sebelum diajukan ke kementerian pusat.
- **BP3OKP merencanakan inisiasi program bimbingan teknis berkala** bersama kementerian terkait bagi seluruh aparat perencana daerah se-Papua Tengah guna menyamakan persepsi operasional perencanaan pembangunan khusus Papua.

5. LAPORAN RINGKAS KEGIATAN RAPAT SINKRONISASI, HARMONISASI, EVALUASI, DAN KOORDINASI (SHEK) BP3OKP DENGAN DEWAN ADAT PAPUA TERKAIT PERMASALAHAN KAWASAN HUTAN DI DISTRIK SIRIWO -24 AGUSTUS 2026

A. Latar Belakang dan Tujuan



Pertemuan ini diselenggarakan oleh Pokja Polhukam BP3OKP Wilayah Papua Tengah sebagai respons atas aspirasi dan keberatan resmi dari Dewan Adat Papua Wilayah Adat Meepago Kabupaten Nabire serta Forum Masyarakat Simapitowa.

Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan penolakan terhadap pemasangan plang klaim kawasan hutan sepihak oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kilometer 95 dan Kilometer 102, Distrik Siriwo, sekaligus membuka ruang dialog netral terkait **"isu"** rencana pembangunan fasilitas militer, aktivitas pertambangan, dan proyek strategis nasional agar tidak memicu eskalasi konflik sosial di atas tanah adat pemilik hak ulayat

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan Kegiatan audiensi dan penyerapan aspirasi ini dilaksanakan pada: Hari / Tanggal: Senin, 24 Agustus 2026, Tempat: Ruangan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Wilayah Papua Tengah.

C. Peserta

Pihak yang Hadir: Ernes Madai (Perwakilan Dewan Adat Meepago Kabupaten Nabire), Frans Magai (Sekretaris Jenderal Dewan Adat Nabire). Unsur Kelompok Kerja (POKJA) Papua Polhukam dan Papua Produktif BP3OKP.

D. Hasil yang Dicapai



Pemetaan Melalui pertemuan ini, Pokja Papua Polhukam berhasil mendokumentasikan pernyataan keberatan resmi dari Dewan Adat Kabupaten Nabire dan Forum Masyarakat Simapitowa terkait penanaman papan nama klaim sepihak di Kilometer 95 dan Kilometer 102, Distrik Siriwo.

Dari hasil koordinasi, teridentifikasi bahwa akar permasalahan utama bersumber dari kurangnya komunikasi dan koordinasi karena tindakan penertiban tersebut dilakukan tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari kepala dusun serta masyarakat adat setempat.

Selain itu, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap **"ISU"** rencana alokasi tanah adat untuk pembangunan fasilitas militer, aktivitas pertambangan, dan proyek strategis nasional yang dinilai mengabaikan hak-hak local.

Kendati demikian, tercapai kesepahaman bersama di mana pihak dewan adat menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen mendukung penuh program pembangunan pemerintah yang membawa kemaslahatan, asalkan prosesnya mengedepankan dialog terbuka serta penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat.



E. Rencana Tindak Lanjut

BP3OKP dijadwalkan melakukan kunjungan kerja langsung ke Kantor Dewan Adat serta melaksanakan audiensi mendalam bersama masyarakat terdampak di Distrik Siriwo pada minggu pertama awal September 2026 guna mencari solusi penyelesaian yang adil dan bijaksana

Publikasi Media

Dalam bulan Agustus, pubilkasi media Badan Pengarah Papua Papua Tengah Adalah sebagai berikut:

1. Instagram

POKJA Papua Produktif melaksanakan SHEK Bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah



POKJA Papua Sehat melaksanakan SHEK dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah terkait afirmasi Beasiswa APBN

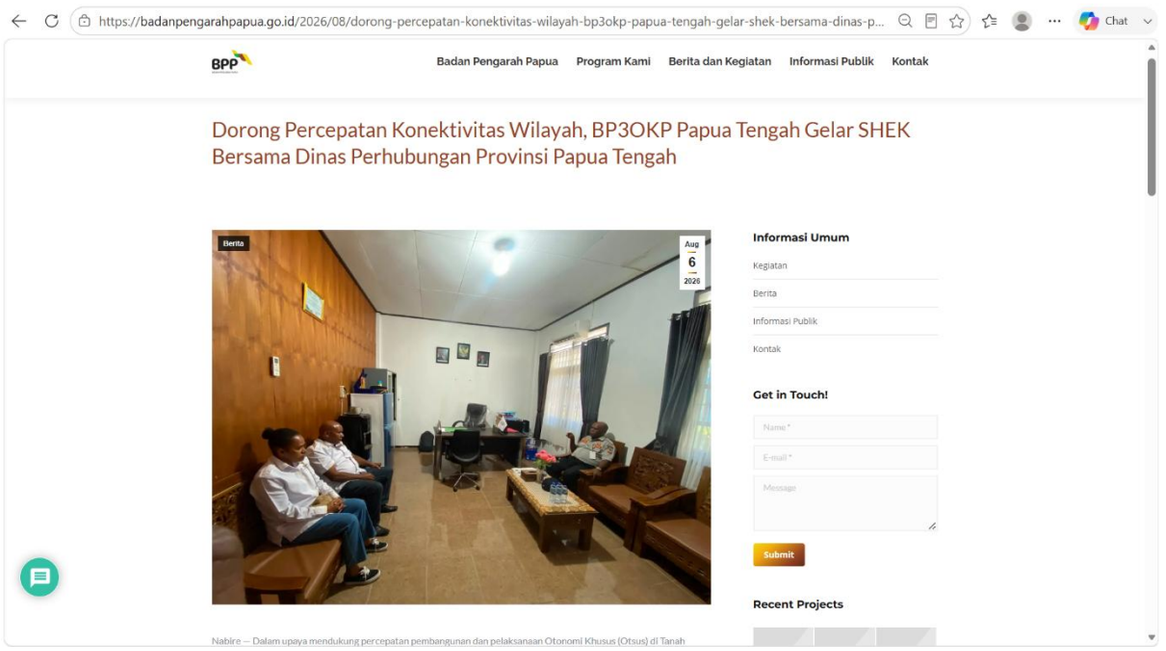


BP3OK Papua Tengah Mengucapkan Dirgahayu RI ke – 81

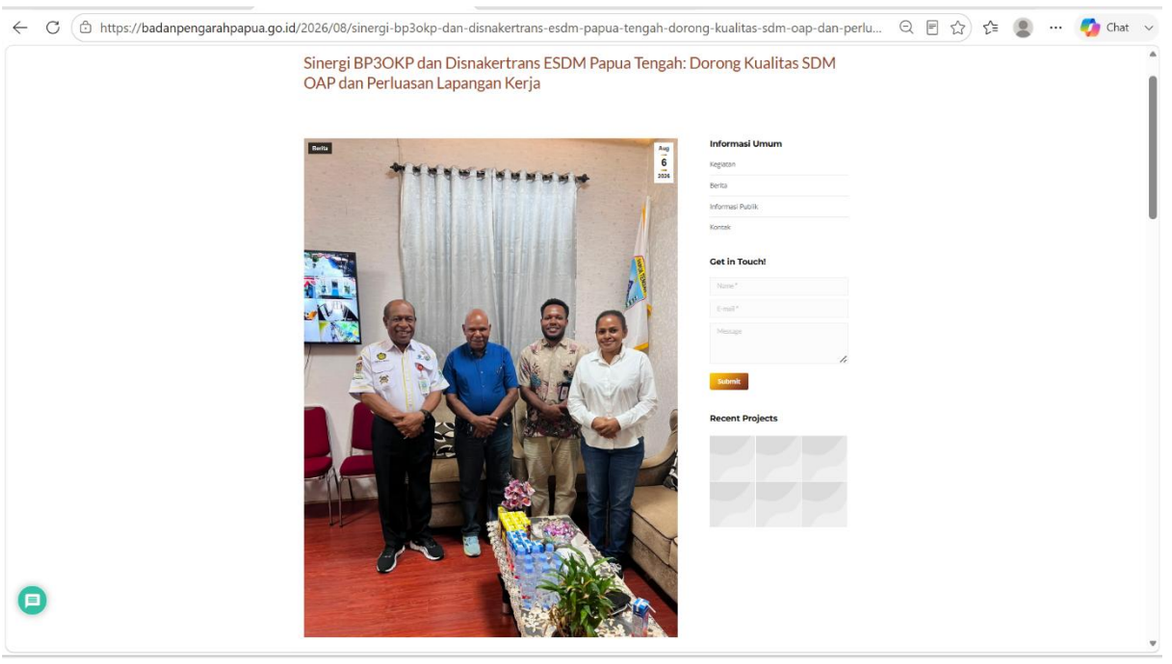


2. WEBSITE

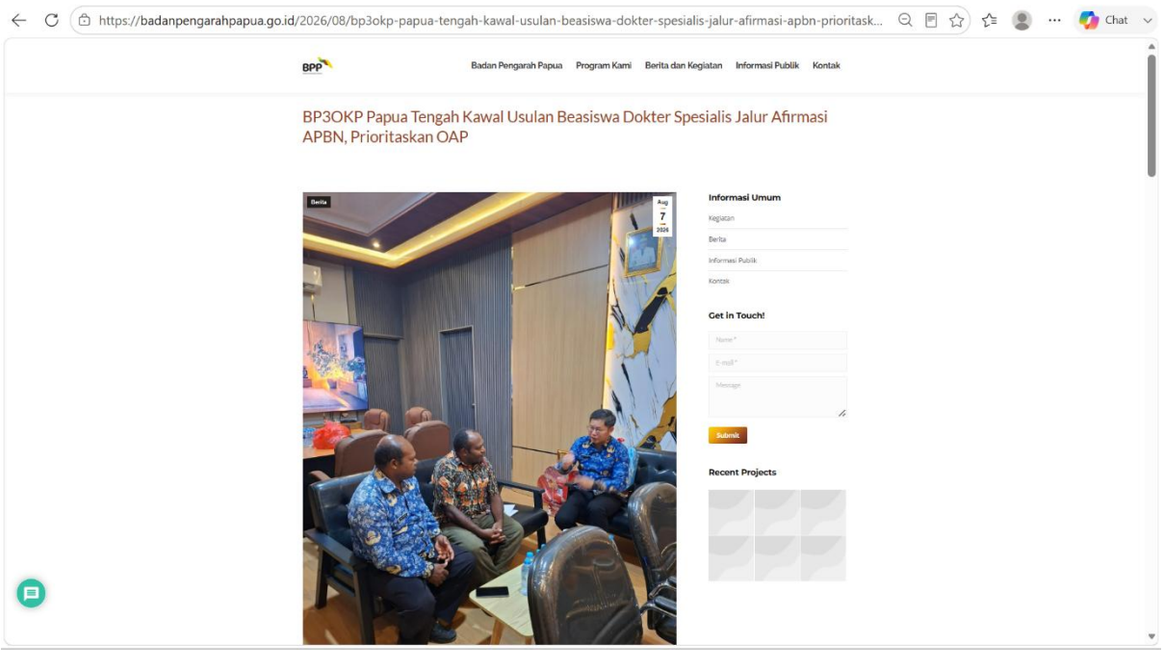
Dorong Percepatan Konektivitas Wilayah, BP3OKP Papua Tengah Gelar SHEK Bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah - Badan Pengarah Papua



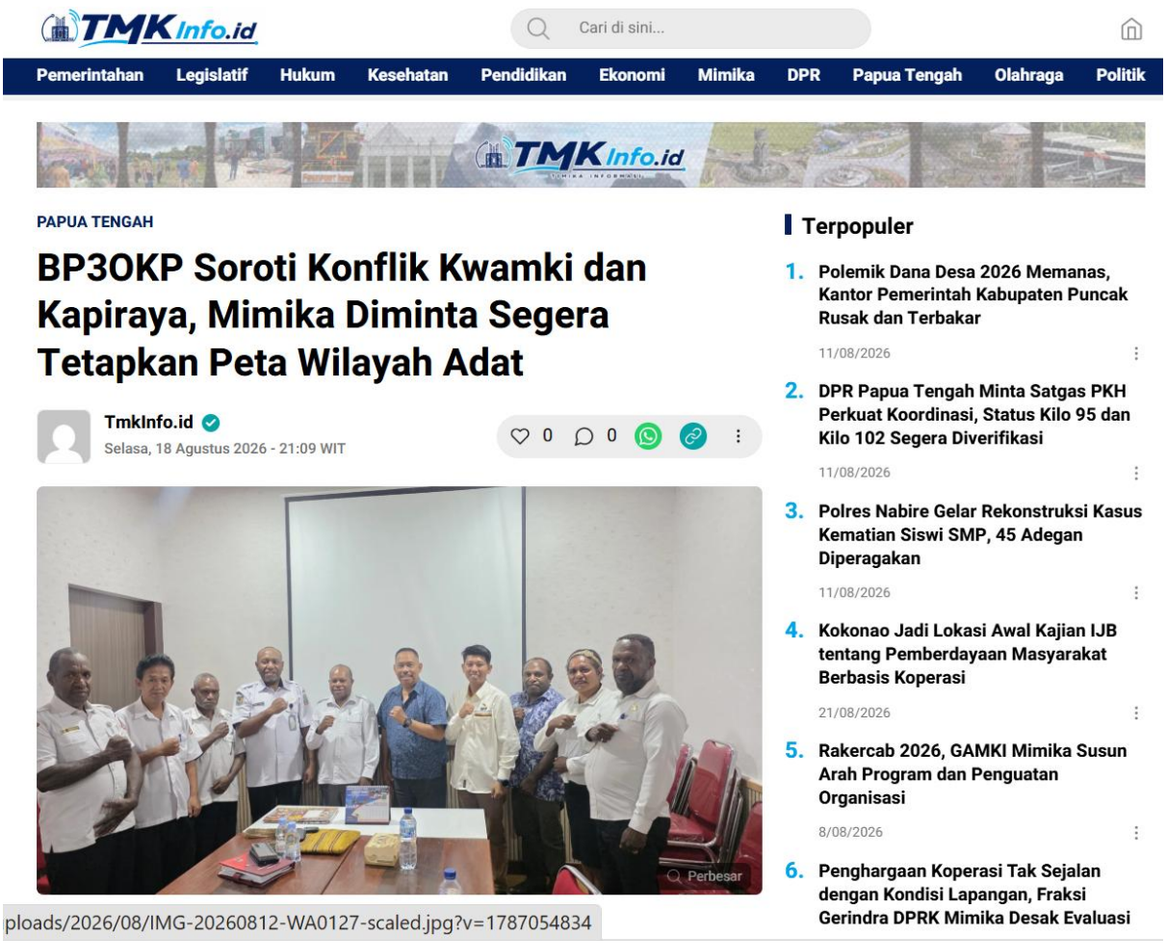
Sinergi BP3OKP dan Disnakertrans ESDM Papua Tengah: Dorong Kualitas SDM OAP dan Perluasan Lapangan Kerja - Badan Pengarah Papua



https://badanpengarahpapua.go.id/2026/08/bp3okp-papua-tengah-kawal-usulan-beasiswa-dokter-spesialis-jalur-afirmasi-apbn-prioritaskan-oap/



https://timikainfo.id/bp3okp-soroti-konflik-kwamki-dan-kapiraya-mimika-diminta-segera-tetapkan-peta-wilayah-adat/



ploads/2026/08/IMG-20260812-WA0127-scaled.jpg?v=1787054834

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF